

EKONOMI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

Mat Jalil

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Email: matjalil@gmail.com

Abstract

Sharia economics has been discussed lately, which is all lines call sharia. Islamic banks, sharia pawnshops, sharia insurance, sharia gold, scattered as if fight for sharia title, which is resulted in doubt into the sharia itself. Sharia economy have the complexity and complicated situations, when faced to market management phenomena and wider relugation as well as implications and solutions of sharia economy. Sharia economy in Pancasila perspective becomes important to be lifted with consideration that sharia economy growth in Indonesia, managed by many private sector, it shows where the position of state in this context along with widespread of decentralization issue. Public support for sharia economy is strengthening, sharia economy not just calling or spreading syaria in his efforts but requires the provisions of the Qur'an and Hadith. Economic concepts practically relate to various issues, political, legal, social, cultural, religious and so forth. economic enforcement adopted by the Indonesian people ideologically refers to Pancasila which means incorporating the values of Pancasila in it.

Keywords: Economic, Ideological, Pancasila

A. PENDAHULUAN

Sifat dan ciri suatu struktur perekonomian bangsa memberikan corak tertentu pada masyarakat dan sekaligus dapat membedakan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya, keadaan ini timbul dari keadaan alam, geografis psikologis, politik institusi dan kemajuan-kemajuan teknik yang terdapat pada masyarakat¹. Perkembangan dan pertumbuhan perekonomian selalu berhubungan dengan perubahan tehnologi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi adalah sumberdaya manusia, sumber alam, ilmu pengetahuan, budaya dan modal. sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonominya sering mengalami pasang surut, kadang berjalan lambat, pesat dan kadang merosot

Kedaulatan Indonesia berakar pada pengalaman hidup sehari-hari yang bercorak *kolektivisme*. Demokrasi Indonesia berdasarkan demokrasi asli yang berlaku di dalam desa Indonesia yaitu cita-cita perjuangan dan terlaksananya dasar-dasar perikemanusiaan dan keadilan sosial "Demokrasi politik tidak dapat melaksanakan

¹ Syahril, *Menuju Masyarakat Adil Makmur* (Jakarta: Gramedia, 1989), h. 4.

persamaan dan persaudaraan, karenanya demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi². Cita-cita demokrasi Indonesia adalah demokrasi sosial meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia

Reformasi sosial agar pelaku-pelaku ekonomi rakyat berlandaskan nilai-nilai Pancasila dapat berperan atau punya posisi tawar yang kukuh dalam hubungannya dengan pelaku sektor ekonomi modern yang secara langsung melakukan proses eksploitasi dengan dukungan penguasa. Reformasi sosial mengandung pengertian koreksi terhadap dialektika hubungan ekonomi secara fundamental sehingga diperoleh hubungan ekonomi yang adil antara pelaku ekonomi dalam masyarakat. Reformasi sosial dapat dilakukan dengan menghimpun para pelaku ekonomi rakyat melalui organisasi koperasi, BMT, dan bank-bank syariah jelas ada relevansinya dengan program ekonomi kerakyatan yang sedang digalakan oleh pemerintah. Kondisi bangsa Indonesia sedang mengupayakan ekonomi syariah, dengan memberdayakan rakyat kecil, ini jelas menggambarkan roh idealis ekonomi Pancasila tetap hidup dan relevan dengan situasi bangsa, melalui keikutsertaan rakyat.

Ideologi Pancasila sebagai Filsafat bangsa memuat orientasi dasar bahwa aktivitas bangsa Indonesia seyogyanya menjadikan Pancasila sebagai rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sila demi sila Pancasila adalah tuntunan yang harus di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi Pancasila menjadi keharusan baik secara subyektif maupun objektif dimensi implementasinya menyangkut semua aspek kehidupan, meliputi bidang ekonomi. Pancasila dalam pembahasannya tidak parsial bahkan cenderung menjadi pintu masuk dalam ruang pembahsan yang lebih luas.

Ekonomi Syariah yang akhir – akhir ini menjamur, yang hampir semua leni menamakan syariah. Bank – bank syariah, gadai syariah, asuransi syariah, emas syariah bertebaran seolah – olah berebut kata syariah, yang mengakibatkan meragukan ke syariahnya. Ekonomi Syariah merujuk pada situasi kompleks dan rumit, bila dihadapkan pada fenomena pengelolaan, market mapun wacana yang lebih luas

² Sri Edi Swosono, *Muhammad Hatta: Beberapa Pokok Pikiran* (Jakarta: Yayasan Hatta, 1992), h. 121.

relugasi, implikasi dan solusi ekonomi syariah. Titik tekan ekonomi syari'ah bagaimana memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi dan pemberdayaan rakyat.

Secara teoritis konsep perekonomian ini ingin mensejahterakan tetapi dalam praktik, kasus relasinya dengan negara, globalisasi ekonomi menciptakan kekuatan - kekuatan geo-ekonomi ekstranasional yang cenderung hanya memanfaatkan kata syariah sebagai dasar untuk menghalalkan segala tindakan, yang justru semakin meningkatkan kapitalisasi yang menguat dan menunjukkan ketidakadilan semakin meluas. Pertanyaannya, benarkah dalam praktik ekonomi syariah merupakan kapitalisasi? Mengapa keadaan ini bisa terjadi?

Perekonomian syariah dalam perpektif Pancasila menjadi penting untuk diangkat dengan pertimbangan ekonomi syariah berkembang di Indonesia banyak dikelola oleh swasta menunjukkan dimana posisi negara dalam konteks ini seiring dengan meluasnya isu desentralisasi, menguatnya dukungan masyarakat terhadap ekonomi syariah, mengingat ekonomi syariah bukan hanya menamakan atau melebelkan kata syariah dalam usahanya melainkan memerlukan ketentuan Al-Quran dan Hadist.

B. KAJIAN TEORI.

1. Filosofi Ekonomi syari'ah

Ekonomi syari'ah atau ekonomi Islam merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, ekonomi syariah hadir menganalisis ekonomi dengan berdasarkan Al Qur'an dan hadis. Dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah yaitu Al Qur'an dan Nabi Muhammad, kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip berlaku tetap, tidak dapat berubah kapanpun dan dimana pun.

Pemikiran dan aktivasi ekonomi syari'ah di Indonesia lebih diorientasikan pada lembaga keuangan dan perbankan syari'a³. Pandangan masyarakat Indonesia terhadap lembaga keuangan syari'ah dapat diwakili dengan pandangan masyarakat terhadap perbankan syari'ah dimana perkembangannya memunculkan berbagai reaksi, ekonomi syari'ah melaju dengan pesat namun masih dipandang dengan berbagai ungkapan bank syari'at tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, bahkan jika ditanya apa bedanya pelaku ekonomi syaria'h belum dapat menjelaskan secara jelas. Pada analisis kajian ekonomi konvensional diasumsikan aktivitas ekonomi di dorong oleh keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka memenuhi kepuasan⁴ tingkan kepusan yang tinggi di tengah-tengah kehidupan ekonomi masyarakat. Islam memandang kehidupan ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh sejauh mana kualitas kehidupan individu, dimana individu akan nyaman apabila kondisi masyarakatnya mendukung.

Aktivasi ekonomi syari'ah di Indonesia dipengaruhi oleh konsep-konsep Islam dalam kegiatan ekonomi yang berlandaskan Al-qur'an dan hadis sebagai budaya masyarakat Islam. Para pakar memberikan pengertian ekonomi syariah atau ekonomi Islam berbeda, menurut Muhammad Najtulah Sisdik dalam bukunya ekonomi Islam, sebagaimana di kutif oleh Nur Kholis, "*the muslim thinkers responseto the economic challengesof their times this responseis naturally inspired by theteaching of Qur'an and Sunnah as well as rooted in them*"⁵ menurut Mannan ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islami⁶ Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berupaya menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi yakni menegakkan keadilan berdasarkan nilai-nilai ekonomi.

2. Tujuan Ekonomi Syariah

³ Nur Kholis, *Menjawab Keraguan Ekonomi Syariah* (Jakarta: MSI UII bekerja sama dengan Safiria Insania Press, 2008), h. 16.

⁴ Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 34.

⁵ Sholahuddin, h. 26.

⁶ Abduh Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Wakaf, 1993), h. 18.

Tujuan dari ekonomi syariah untuk menciptakan kesejahteraan. Kesejahteraan menurut pandangan Islam mencakup dua:

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang
2. Kesejahteraan dunia dan akhirat⁷

Tujuan Ekonomi Syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri yakni mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan, diantaranya:

1. Mencari kesenangan akhirat yang di ridhoi Allah SWT
2. Jangan melalaikan perjuangan nasib dunia yaitu mencari rejeki dan hak milik
3. Berbuat baik kepada masyarakat
4. Jangan mencari kebinasaan di muka bumi⁸

Mencari kesenangan kehidupan akhirat dengan mengutamakan ketuhanan, ini berarti manusia setelah hidupnya di dunia masih ada hidup yang kekal dimana setiap orang harus dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, oleh karenanya manusia dalam membangun perekonomiannya harus mengutamakan ketuhanan. Tujuan ekonomi harus mengusahakan produksi, distribusi maupun konsumsi, dan dalam materi harus diisi dengan jiwa kerohanian dan semangat ketuhanan.

Memperjuangkan kebutuhan hidup duniawi, ini berarti manusia tidak serakah, egoistis dan individualis. Homo economicus dalam jiwa manusia bukan berarti berlebih-lebihan dan untuk kemewahan diri sendiri tetapi jangan sampai melupakan kepentingan umum. Negara mengatur dengan sitem pajak dan Islam mengatur dengan sistem zakat, karena itu manusia membatasi dirinya mencari hanya sekedar bagian nasibnya tergambar dalam pribadinya, tujuan ekonomi syari'ah dalam memperjuangkan nasibnya, pengakuan hak milik dibatasi oleh lingkungan atau hak orang lain.

⁷ P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 6.

⁸ Abdul Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.

Menciptakan kesejahteraan sosial, masyarakat menjadi yang terpenting dalam ekonomi Islam, ekonomi Islam menganut faham sosialisme yang berjiwa religius bukan sosialis komunis, melalui ajaran zakat, ekonomi Islam dapat menghapus kemiskinan dan menghindari pertentangan kelas dalam masyarakat, ekonomi Islam dapat mendekatkan *the have dan the have not*.

Kebiasaan di muka bumi dan penghancuran ekonomi sering terjadi akibat manusia mempunyai sifat egoistis dan individualis. Kepentingan pribadi yang tidak terbatas akan menimbulkan kapitalis yang melahirkan imperialisme yang dapat membinasakan di muka bumi. Sifat imperialisme akan membentuk ekonomi liberalis yang menghendaki kebebasan seluas luasnya dalam mengelola perekonomian.

3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi berfungsi sebagai kaidah atau aturan pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Prinsip ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islam. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip ekonomi Islam:

- a. Kerja (resource utilization)
- b. Kompensasi (compensation)
- c. Efisiensi (efficiency)
- d. Profesionalisme (professionalism)
- e. Kecukupan (sufficiency)
- f. Pemerataan kesempatan (equal opportunity)
- g. Kebebasan (freedom)
- h. Kerjasama (cooperation)
- i. Persaingan (competition)
- j. Keseimbangan (equilibrium)
- k. Solidaritas (solidarity)
- l. Informasi Simetri (symmetric information)⁹

Prinsip ekonomi Islam merupakan Kerja (*resource utilization*), kompensasi (*compensation*), efisiensi (*efficiency*), profesionalisme (*professionalism*), kecukupan

⁹ P3EI, *Ekonomi Islam*, h. 66-69.

(*sufficiency*), pemerataan kesempatan (*equal opportunity*), kebebasan (*freedom*), kerjasama (*coopration*), persaingan (*competition*), keseimbangan (*equilibrium*), solidaritas (*solidarity*), informasi Simetri (*simmetric information*). Sistem ekonomi syariah harus memiliki fondasi yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia.

4. Filosofi Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem ekonomi yang digali dan berlandaskan pada ideologi Pancasila. sebuah sistem perekonomian yang digali lima sila dari Pancasila Yakni sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai - nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menganut demokrasi ekonomi. Tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan kemakmuran masyarakat dengan berpegang pada politik ekonomi. Politik dan ekonomi merupakan suatu hal yang penting, politik dan ekonomi harus sejalan, mendorong ekonomi untuk kemakmuran yang meliputi segala yang diinginkan manusia untuk memperoleh penghidupan yang lebih sempurna¹⁰. Politik yang tidak ditunjang ekonomi tidak akan sempurna demikian juga ekonomi tidak akan berjalan lancar bila tidak ditunjang oleh pergerakan politik

Sistem ekonomi Pancasila dijiwai oleh ideologi Pancasila berazaskan kekeluargaan dan gotongroyong, sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berusaha atau membangun usaha perekonomian. Pancasila merupakan ideologi dan pandangan hidup bangsa, maka Pancasila dengan berbagai silanya merupakan landasan etika politik ekonomiya yakni landasan moral spritual¹¹ melalui landasan moral spritual dikembangkan pedoman dasar strategi dan kebijakan pembangunan nasional. Strategi pembangunan ekonomi nasional diturunkan dari masing-masing sila Pancasila dalam kaitan amanat pasal 33

¹⁰ Hatta, *Beberapa Pasal Ekonomi* (Djakarta: Balai Pustaka, 1960), h. 19.

¹¹ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat Program IDT & Demokrasi Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), h. 61.

UUD 1945 Sistem ekonomi Pancasila terdapat pada UUD 1945 Pasal 33 Setelah Amandemen 2002.

1. Perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan disusun sebagai usaha bersama.
2. Sumber daya yang meliputi bumi dan air serta kekayaan alam lainnya yang terkandung dalam nya, dikuasai oleh negara dengan tujuan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
3. Negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan atas dasar demokrasi ekonomi, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Langkah yang harus ditempuh perlu adanya kebijakan ekonomi yang tidak semata-mata menekankan pada pertumbuhan, perlu membangun komitmen yang lebih kuat untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang mengacu kepada demokrasi ekonomi agar pembagian kekayaan tidak terkonsentrasi pada suatu kelompok kecil tertentu. Kepentingan stabilitas politik adalah bagaimana mengatasi kesenjangan ekonomi dan mendorong pemerataan dalam upaya mempercepat terbentuknya kelas menengah sebagai kekuatan dan pemicu demokratisasi.

Kedaulatan rakyat merupakan mufakat bersama untuk mewujudkan masyarakat adil makmur, sedangkan masyarakat adil makmur adalah masyarakat sosialis masa depan¹². Demokrasi kedaulatan rakyat adalah rakyat boleh melakukan tindakan yang sesuai dengan perasaan kebenaran dan keadilan

¹² Mubyarto, *Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia* (Jakarta: MSI UII bekerja sama dengan Safiria Insania Press, 2008), h. 376.

yang hidup dalam golongannya. Kedaulatan rakyat berarti rakyat yang “Berkuasa untuk menentukan peraturan tentang hidup bersama dalam negara, maka rakyat bertanggung jawab atas segala akibat dari peraturan yang dibuatnya¹³. Kedaulatan rakyat memberi kekuasaan tertinggi pada rakyat tetapi mempunyai tanggung jawab yang besar. Dasar pemerintahan yang adil ialah siapa yang mendapat kekuasaan itu yang bertanggung jawab, manakala rakyat mendapat kekuasaan menurut kedaulatan rakyat, maka rakyat itu yang bertanggung jawab terhadap keadilan.

C. METODOLOGI

Isu ekonomi syari’ah dan Pancasila bersifat normatif karenanya tidak dapat disebut sebagai disiplin ilmu pengetahuan tersendiri, belum lagi metodologinya apakah menggunakan induktif atau deduktif ini merupakan kontradiksi dalam ilmu kefilosofan. Pembahasan ekonomi syariah dalam perspektif Pancasila menggunakan metode induktif dan deduktif.

Induktif dibutuhkan dalam rangka mengambil kesimpulan dari yang sifatnya khusus menuju pada kesimpulan umum, dan metode deduktif dalam rangka mengambil kesimpulan dari hal yang umum untuk hal-hal yang khusus, dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif, interpretasi

Penelitian dilakukan dengan penelitian langsung, melakukan pengumpulan data, dan mengingat penelitian bersifat kualitatif maka teknik penelitian dilakukan dengan pengumpulan data pada sumber-sumber data, dan peneliti langsung melakukan analisis.

D. HASIL PENELITIAN

Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia mencerminkan sebagai kontrak rakyat menjadi sumber nilai dari setiap praksis kehidupan yang berlangsung¹⁴ Pancasila sebagai Filsafat bangsa memuat orientasi dasar bahwa aktivitas bangsa Indonesia seyogyanya menjadikan Pancasila sebagai rujukan dalam kehidupan

¹³ Hatta, *Pengertian Pancasila, Pidato Peringatan Lahirnya Pancasila Tanggal 1 Juni 1977, Di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta Dengan Lampiran Uraian Sila Demi Sila* (Jakarta: Indayu, 1977), h. 213.

¹⁴ Hatta, h. 21.

berbangsa dan bernegara, sila demi sila Pancasila adalah tuntunan yang harus di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi Pancasila menjadi keharusan baik secara subyektif maupun objektif¹⁵ dimensi implementasinya menyangkut semua aspek kehidupan, meliputi bidang ekonomi. Pancasila dalam pembahasannya tidak parsial bahkan cenderung menjadi pintu masuk dalam ruang pembahsan yang lebih luas.

Konsep ekonomi secara praktis mengkaitkan berbagai isu, politik, hukum, sosial, kebudayaan, keagamaan dan lain sebagainya. Pembahasan mengenai konsep ekonomi yang dianut bangsa Indonesia secara ideologis mengacu pada Pancasila yang berarti menyertakan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Bangsa yang mendasarkan ideologinya pada Pancasila, tatanan ekonominya secara logis dibangun berdasarkan ke Pancasila-an. Ekonomi Pancasila dilandasi dengan citra Kethanan Yang Maha Esa, mengemban aspek kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berwawasan Nusantara untuk memperoleh hikmah kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial¹⁶ konsep ekonomi selalu dipahami dalam konteks ke Pancasila-an

Konsep dasar ekonomi Pancasila senantiasa menyertakan pemahaman dasar pada Pancasila yang dalam praktik lapangan mengelaborasi melalui muatan lima sila. Konsep ekonomi Pancasila berorientasi pada ajaran mengenai moralitas menuju pemerataan sosial demi terwujudnya ekonomi nasional yang tangguh bersifat kekeluargaan dan desentralistik¹⁷

1. Ekonomi Pancasila pada hakikatnya tidak oportunistis, tetapi menunjukkan orientasi yang jelas dan tegas
2. Ekonomi Pancasila tidak berorientasi materialistik karena bertitik tolak dari eksistensi dan martabat manusia.
3. Ekonomi Pancasila tidak berorientasi Pragmatis karena menggunakan manusia dan nilai manusia sebagai ukuran penilaian.
4. Ekonomi Pancasila berorientasi pada inti dan tujuan hidup bersama¹⁸

¹⁵ Kailan, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia* (Yogyakarta: Paradigma, 2002), h. 253.

¹⁶ Siswanto, *Pancasila Refleksi Komprehensif* (Yogyakarta: Filsafat UGM, 2007), h. 87.

¹⁷ Mubyarto, *Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia*, h. 155.

¹⁸ Siswanto, *Pancasila Refleksi Komprehensif*, h. 89.

Konsep ekonomi Pancasila sejalan dengan gagasan bahwa pemikiran dan sikap hidup yang dikembangkan hendaknya diupayakan untuk senantiasa mengutamakan prinsip kekeluargaan.

Dimensi ekonomi, rakyat memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk mengembangkan aktivitas ekonominya, sehingga rakyat dapat melepaskan ketergantungan terhadap bentuk-bentuk intervensi pemerintah, serta dapat mengembangkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Eksploitasi sumberdaya dilakukan untuk kepentingan masyarakat secara luas dan dilakukan oleh masyarakat lokal yang memiliki hak-hak atas sumber daya lokal, dengan cara ini sistem kapitalisme dapat dihindari. Pemberdayaan ekonomi lokal mengandung muatan ideologis yang cenderung mengarah pada sosialisme dan merupakan bagian terpenting dari substansi demokrasi.

Konsep ekonomi tidak bisa dilepaskan dari pembahasan narasi besar filsafat Pancasila, proses dari segala aktivitas ekonomi hendaknya menjadikan Pancasila sebagai titik pijakan. Permasalahannya adalah bagaimana konteks filsafat Pancasila terjabarkan dalam dimensi kehidupan nyata di bidang ekonomi. Tuntunan ekonomi Pancasila yang dibangun dengan argumentasi filosofis bekerja mengandaikan bagaimana pergerakan ekonomi masyarakat yang dikelola oleh negara dan pasar merujuk pada visi dasar Pancasila, implantasi visi dasar dalam kasus demi kasus menjadi penting.

Pancasila dalam sistem perekonomian yang di bangun di Indonesia. Kasus yang diangkat Ekonomi Syariah yang akhir - akhir ini menjamur, yang hampir semua leni menamakan syariah. Bank - bank syariah, gadai syariah, asuransi syariah, emas syariah bertebaran seolah - olah berebut kata syariah, yang mengakibatkan meragukan ke syariahnya. Ekonomi Syariah merujuk pada situasi kompleks dan rumit, bila dihadapkan pada fenomena pengelolaan, market mapun wacana yang lebih luas relugasi, implikasi dan solusi ekonomi syariah.

Perekonomian syariah dalam perpektif Pancasila menjadi penting dengan pertimbangan ekonomi syariah berkembang di Indonesia banyak dikelola oleh swasta menunjukkan dimana posisi negara dalam konteks ini seiring dengan meluasnya isu desentralisasi, menguatnya dukungan msyarakat terhadap ekonomi syariah,

mengingat ekonomi syariah bukan hanya menamakan atau melebelkan kata syariah dalam usahanya melainkan memerlukan ketentuan Al-Quran dan Hadist.

Perkembangan praktik ekonomi syariah dari berbagai aspeknya telah menunjukkan catatan pertumbuhan baik dari sisi aset. Pelaku maupun kantor cabangnya cukup menggembirakan¹⁹. Ekonomi Syariah di Indonesia sudah menghasilkan produk-produk riak seperti Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT, Perbankan Syariah, Reksadana Syariah, Asuransi syariah, pasar modal Syariah Obligasi Syariah (sukuk), Asuransi Syariah.

Tujuan dari ekonomi syariah untuk menciptakan kesejahteraan. Kesejahteraan menurut pandangan Islam mencakup dua hal:

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang
- b. Kesejahteraan dunia dan akhirat²⁰

Kesejahteraan holistik dan seimbang mencakup kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual, mencakup individu dan sosial. Sedangkan kesejahteraan dunia dan akhirat ditujukan pada kecukupan dunia dalam rangka untuk memperoleh kecukupan akhirat.

Secara teoritis konsep perekonomian ini ingin mensejahterakan tetapi dalam praktik, kasus relasinya dengan negara, globalisasi ekonomi menciptakan kekuatan – kekuatan geo-ekonomi ekstranasional yang cenderung hanya memanfaatkan kata syariah sebagai dasar untuk menghalalkan segala tindakan, yang justru semakin meningkatkan kapitalisasi yang menguat dan menunjukkan ketidakadilan semakin meluas.

Praktik ekonomi syariah dikaji secara filosofis dari perspektif Pancasila, kajian ini akan membawa implikasi praktis dan teoritis. Secara praktis kajian ini akan mengeksplorasi ekonomi yang disinyalir hanya berlabel syariah yang berimplikasi pada penguatan kapitalis. Pancasila diposisikan dalam konteks acuan referensi kritik. Implikasi secara teoritis adalah kajian keilmuan filsafat Pancasila yang akan ditempatkan sebagai pemikiran akademis terkait dengan operasionalnya, sehingga secara teoritis akan berpusat pada diskursus pada penjabaran konsep filsafat Pancasila.

¹⁹ Amir Mu'alim, *Menjawab Keragaman Berekonomi Islam* (Yogyakarta: Safitria Insania Press, 2008), h. V.

²⁰ P3EI, *Ekonomi Islam*, h. 6.

Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem ekonomi yang digali dan berlandaskan pada ideologi Pancasila. Yakni sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai - nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menganut demokrasi ekonomi. Tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan kemakmuran masyarakat dengan berpegang pada politik ekonomi. Politik dan ekonomi merupakan suatu hal yang penting, politik dan ekonomi harus sejalan, mendorong ekonomi untuk kemakmuran yang meliputi segala yang diinginkan manusia untuk memperoleh penghidupan yang lebih sempurna²¹. Politik yang tidak ditunjang ekonomi tidak akan sempurna demikian juga ekonomi tidak akan berjalan lancar bila tidak ditunjang oleh pergerakan politik.

Pemikiran ekonomi tertuang pada pasal 33 UUD 1945, empat hal yang menentukan perekonomian suatu negara yaitu: pertama, kekayaan tanah. Kedua, kedudukan terhadap negara lain dalam lingkungan internasional. Ketiga, sikap dan kecakapan rakyat. Keempat, sejarah sebagai bekas jajahan²². Unsur keempat dimensi sejarah sering dilupakan, sehingga tidak banyak yang peduli akan perkataan kedua dari ayat 1 pasal 33 UUD 1945. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang, sebab itu cabang - cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasi oleh negara, kalau tidak tampuk produksi jatuh ketangan orang seorang yang berkuasa, dan rakyat ditindas, pembangunan ekonomi menjadi lemah.

Demokrasi ekonomi menolak prinsip konsentrasi kekuasaan ekonomi ditangan segelintir orang, atau kelompok juga menolak *etatisme*, dan penciptaan inisiatif rakyat²³ Demokrasi didasarkan pada cita-cita kemerdekaan Indonesia, sebagai mana tercantum dalam UUD 1945, yang secara implisit pengembangan koperasi sebagai unit ekonomi untk tujuan mengubah dialektika hubungan ekonomi kolonial menjadi dialektika ekonomi nasional. Koperasi memuat semangat ekonomi rakyat berdasar pada cita - cita kolektif, gotong royong dan tolong menolong.

²¹ Hatta, *Pengertian Pancasila, Pidato Peringatan Lahirnya Pancasila Tanggal 1 Juni 1977, Di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta Dengan Lampiran Uraian Sila Demi Sila*, h. 9.

²² Sri Edi Swosono, *Muhammad Hatta: Beberapa Pokok Pikiran*, h. 4.

²³ Sirtua Arief, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2002), h. 193.

Demokrasi ekonomi sebagai upaya untuk mengubah dialektika hubungan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional perlu adanya proses *restrukturisasi* penguasaan sumber – sumber ekonomi nasional yang tercermin dalam nasionalisme ekonomi yaitu: Pertama, *deverifikasi* produksi untuk menghilangkan ketergantungan ekspor bahan mentah primer. Kedua, pengalihan dominasi penguasaan usaha – usaha ekonomi dari tangan asing dan golongan Cina ketanngan pribumi Indonesia²⁴ melalui nasionalisme ekonomi merupakan salah satu motivasi perjuangan kemerdekaan.

Tujuan ekonomi Indonesia bukan untuk meneruskan dasar ekonomi kolonial memajukan ekspor ekonomi karena sistem ekspor ekonomi keliru, memutar ujung pada pangkal. Bukanlah ekspor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negara, tetapi pertumbuhan ekonomi dalam negaralah yang mendorong ekspor. Kebijakan ekonomi bertumpu pada mempertinggi tenaga beli rakyat di dalam negara²⁵. Demokrasi ekonomi berdasar pada paham kolektif tidak ada pertentangan antara masyarakat dan negara, negara adalah alat masyarakat untuk menyempurnakan keselamatan umum. Tanah kosong harus diusahakan oleh negara menjadi sumber ekonomi kemakmuran rakyat, negara dapat mendasarkan politiknya terhadap tanah untuk kemakmuran rakyat, atas kepentingan tanah sebagai faktor utama ekonomi, misal perusahaan tambang dijalankan sebagai usaha negara, dan perusahaan yang pokok harus menjadi usaha negara untuk kepentingan rakyat.

Perekonomian yang sesuai dengan cita – cita tolong menolong ialah koperasi. Koperasi adalah usaha bersama untuk menyelenggarakan keperluan bersama. Koperasi mendahulukan keperluan bersama dan membela kepentingan bersama, koperasi melahirkan sosialisme kolektif, tiga anasir yang melandasinya yaitu: Pertama, sosialisme barat bertitik berat pada cita – cita humanisme. Kedua, ajaran agama islam yang menghendaki keadilan dan persaudaraan antara manusia. Ketiga, gotong royong yang terdapat pada masyarakat asli Indonesia. Masyarakat kolektif tiap – tiap individu merasa dalam tindakan merupakan bagian dari satu golongan yang besar. Sikap masyarakat kolektif dalam menuju kemakmuran selalu dalam konteks kebersamaan sosialis.

²⁴ Sirtua Arief, h. 48.

²⁵ Sri Edi Swosono, *Muhammad Hatta: Beberapa Pokok Pikiran*, h. 5.

E. KESIMPULAN

Demokrasi Pancasila bukan hanya dalam politik tetapi diperluas menjadi demokrasi ekonomi, sosial, dan psikologi, wujud cita-cita demokrasi Indonesia menumbuhkan tanggung jawab dan toleransi. Sejalan dengan Ekonomi Syariah berkembang di Indonesia dikelola oleh swasta menunjukkan dimana posisi negara dalam konteks ini seiring dengan meluasnya isu desentralisasi, menguatnya dukungan masyarakat terhadap ekonomi syariah. Ekonomi Pancasila sebuah sistem ekonomi yang digali dan berlandaskan pada ideologi Pancasila. Yakni sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai - nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia, untuk mencapai tujuan kemakmuran masyarakat dengan berpegang pada politik ekonomi. Politik yang tidak ditunjang ekonomi tidak akan sempurna demikian juga ekonomi tidak akan berjalan lancar bila tidak ditunjang oleh pergerakan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh Mannan. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Wakaf, 1993.
- Abdul Zaky Al Kaaf. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Amir Mu'alim. *Menjawab Keragaman Berekonomi Islam*. Yogyakarta: Safitria Insania Press, 2008.
- Hatta. *Beberapa Pasal Ekonomi*. Djakarta: Balai Pustaka, 1960.
- — —. *Pengertian Pancasila, Pidato Peringatan Lahirnya Pancasila Tanggal 1 Juni 1977, Di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta Dengan Lampiran Uraian Sila Demi Sila*. Jakarta: Indayu, 1977.
- Kailan. *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma, 2002.
- Mubyarto. *Ekonomi Rakyat Program IDT & Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
- — —. *Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia*. Jakarta: MSI UII bekerja sama dengan Safiria Insania Press, 2008.
- Nur Kholis. *Menjawab Keraguan Ekonomi Syariah*. Jakarta: MSI UII bekerja sama dengan Safiria Insania Press, 2008.
- P3EI. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Sholahuddin. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Sirtua Arief. *Ekonomi Kerakyatan Indonesia*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2002.

Siswanto. *Pancasila Refleksi Komprehensif*. Yogyakarta: Filsafat UGM, 2007.

Sri Edi Swosono. *Muhammad Hatta: Beberapa Pokok Pikiran*. Jakarta: Yayasan Hatta, 1992.

Syahril. *Menuju Masyarakat Adil Makmur*. Jakarta: Gramedia, 1989.